

BAB II

MUSEUM DAN DIPLOMASI BUDAYA

2.1. Hubungan Singapura dan Prancis

2.1.1 Hubungan Singapura dan Prancis Secara Langsung dan Tidak langsung

Interaksi antara Prancis dan Singapura bermula pada abad ke-19, saat masa ekspansi kekaisaran di Eropa. Saat Prancis menguatkan keberadaannya di wilayah Indochina-Vietnam, Laos, dan Kamboja, Singapura, yang berada di bawah kontrol Inggris, menjadi lokasi penting bagi pedagang dan angkatan laut Prancis yang berkeliling di Asia. Posisi Singapura yang terletak di jalur perdagangan laut membuatnya menjadi pusat bagi kekuatan asing, termasuk Prancis, untuk mempertahankan hubungan tidak resmi serta melakukan transaksi bisnis. (National Library Board Singapore, 2021).

Kolonisasi Prancis di Indochina pada akhir abad ke-19 memiliki dampak yang tidak langsung bagi Singapura. Prancis dan Inggris sebagai kekuatan kolonial menjalin hubungan diplomatik yang sangat hati-hati, sering kali berusaha menyeimbangkan pengaruh mereka. Meskipun terjadi sedikit konflik langsung antara keduanya di Asia Tenggara, kegiatan Prancis di kawasan tersebut membawa efek domino dalam hal perdagangan dan geopolitik, yang memengaruhi posisi strategis Singapura di wilayah itu. (Casse, 1998).

Konteks kolonial dan geopolitik hubungan Prancis-Singapura sebelum kemerdekaan Singapura pada tahun 1965 berakar pada lanskap yang lebih luas dari persaingan kekaisaran Eropa, strategi maritim, dan administrasi kolonial di Asia

Tenggara. Sementara Singapura adalah koloni Inggris sejak tahun 1819, dan Prancis mempertahankan kehadiran yang kuat di Indochina (Vietnam, Laos, dan Kamboja modern), interaksi mereka di kawasan tersebut dibentuk oleh persaingan dan kerja sama. Meskipun Prancis dan Singapura tidak memelihara hubungan diplomatik bilateral formal sebelum kemerdekaan, kepentingan geopolitik mereka berpotongan dengan cara yang signifikan bagi keamanan regional, perdagangan, dan administrasi kolonial. Esai ini mengeksplorasi dinamika kolonial dan geopolitik hubungan Prancis-Singapura, meneliti bagaimana persaingan dan kerja sama antara Prancis dan Inggris terwujud di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks posisi strategis Singapura.

Pada awal abad ke-19, iklim geopolitik Asia Tenggara ditandai oleh ekspansi agresif kekaisaran kolonial Eropa. Kolonisasi Prancis di Cochinchina pada tahun 1850-an dan dominasinya pada akhirnya atas seluruh Indochina pada tahun 1890-an mendorong meningkatnya kesadaran strategis di antara otoritas kolonial Inggris. Akuisisi Inggris atas Singapura pada tahun 1819 oleh Sir Stamford Raffles, sebagian, merupakan langkah pencegahan untuk melawan ambisi Prancis dan Belanda di wilayah tersebut. Posisi Singapura di muara Selat Malaka memberi Inggris kendali yang tak tertandingi atas salah satu titik sempit maritim tersibuk di dunia. Ketertarikan Prancis dalam memperluas pengaruhnya di Asia mencakup berbagai upaya tidak hanya melalui penaklukan militer secara langsung, tetapi juga melalui misi diplomatik, eksplorasi ilmiah, dan misi keagamaan. Misi Montigny (1856–57), misalnya, meskipun utamanya menargetkan Tiongkok dan Vietnam, mewakili ambisi Prancis yang lebih luas untuk memperluas jangkauan budaya dan

politiknya di Asia Timur dan Tenggara (Thompson, 2006). Misi-misi ini diawasi secara ketat oleh otoritas Inggris di Singapura, yang memandang mereka sebagai ancaman potensial terhadap domi Peran Singapura sebagai penyeimbang Indochina Prancis menjadi lebih menonjol saat Prancis memperkuat kendalinya atas Vietnam, Kamboja, dan Laos. Para pembuat kebijakan Inggris melihat Singapura sebagai pangkalan terdepan yang memungkinkan mereka memantau aktivitas angkatan laut Prancis, pergerakan perdagangan, dan manuver politik. Sebagai balasannya, Prancis semakin menyadari pentingnya Singapura sebagai simpul kendali kekaisaran Inggris.

Pada abad ke-19, produksi pengetahuan ilmiah menjadi alat kekaisaran, yang digunakan oleh kekuatan Eropa untuk memetakan, mengkategorikan, dan akhirnya mengendalikan wilayah jajahan. Naturalis Prancis seperti Pierre- Médard Diard dan Alfred Duvaucel melakukan ekspedisi di dalam dan sekitar Singapura, mengumpulkan spesimen botani dan zoologi yang dikirim kembali ke lembaga-lembaga seperti Muséum national d'Histoire naturelle di Paris. Ekspedisi-ekspedisi ini sering kali terkait dengan kepentingan kolonial, karena menyediakan materi untuk beasiswa Eropa dan informasi intelijen untuk administrator kolonial (Raj, 2007).

Meskipun upaya-upaya ini tampaknya non-politik, namun upaya-upaya ini berkontribusi pada infrastruktur pengetahuan kekaisaran yang membentuk kebijakan kolonial. Dalam konteks ini, Singapura berfungsi sebagai titik transit dan dukungan bagi para ilmuwan Prancis yang bepergian antara India, Indochina, dan Cina. Pihak berwenang Inggris di Singapura menyadari implikasi strategis dari

upaya-upaya ilmiah tersebut dan terkadang bekerja sama dengan, tetapi lebih sering mengamati dengan saksama, aktivitas Prancis. Dengan demikian, sains menjadi jembatan sekaligus batas dalam geopolitik kolonial Asia Tenggara.

Pentingnya geopolitik Singapura semakin ditekankan selama abad ke-20, khususnya dalam konteks konflik regional seperti Perang Indochina Pertama (1946–1954). Ketika Prancis berjuang untuk mempertahankan kendali atas koloninya dalam menghadapi gerakan nasionalis yang meningkat, khususnya Viet Minh di Vietnam, Singapura berperan sebagai pos terdepan Inggris untuk pengumpulan intelijen, logistik pasokan, dan komunikasi diplomatik (Harper, 1999).

Meskipun Inggris tidak terlibat langsung dalam upaya perang Prancis, Singapura memainkan peran tidak langsung tetapi krusial. Pemerintah kolonial Inggris memberikan dukungan terbatas melalui pembagian informasi intelijen dan pemantauan gerakan komunis di seluruh Asia Tenggara. Singapura menjadi bagian dari jaringan Barat yang bertujuan untuk membendung penyebaran komunisme, yang mencakup dukungan simpatik terhadap posisi Prancis di Indochina. Upaya perang Prancis secara tidak langsung diuntungkan oleh infrastruktur dan kemampuan intelijen yang ditawarkan Singapura.

Kolaborasi ini, meskipun halus, menandakan pergeseran dari persaingan sebelumnya antara kekuatan kolonial menuju kerja sama pragmatis dalam menghadapi ancaman ideologis bersama selama Perang Dingin. Darurat Malaya (1948–1960) semakin meningkatkan pentingnya koordinasi regional di antara sekutu Barat, termasuk Inggris dan Prancis, saat mereka menghadapi

pemberontakan paralel dan gerakan anti-kolonial. nasi mereka sendiri di wilayah tersebut.

Salah satu momen penting dalam hubungan geopolitik antara Prancis dan Singapura terjadi selama Pemberontakan Singapura tahun 1915. Selama Perang Dunia I, tentara India di Angkatan Darat Inggris yang ditempatkan di Singapura memberontak terhadap komandan mereka, sebagian dipengaruhi oleh sentimen pan-Islam dan ideologi anti-kolonial. Sebagai tanggapan terhadap krisis tersebut, otoritas kolonial Inggris meminta bantuan segera dari pasukan sekutu di wilayah tersebut, termasuk Prancis.

Sebuah kapal perang Prancis yang berada di perairan terdekat menanggapi panggilan tersebut dan mengirim marinir untuk membantu meredakan pemberontakan. Episode ini, meskipun berlangsung singkat, menandai momen langka kerja sama militer langsung antara Prancis dan Singapura yang dikuasai Inggris (Bayly & Harper, 2007). Hal ini menggarisbawahi keterkaitan kekuatan kolonial selama konflik global dan menunjukkan aliansi laten yang dapat diaktifkan pada saat krisis.

Pemberontakan tersebut juga menekankan pentingnya pembagian informasi intelijen dan koordinasi keamanan regional, terutama karena kekaisaran Eropa menghadapi peningkatan perlawanan dari dalam koloni mereka. Dalam konteks ini, Singapura berfungsi tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan angkatan laut, tetapi juga sebagai tempat kerja sama antar-kekaisaran dalam menghadapi ancaman bersama.

Selain pertimbangan militer dan geopolitik, Singapura juga merupakan titik fokus untuk pertukaran maritim dan komersial antara Indochina Prancis dan bagian lain dari dunia kolonial. Kapal dagang Prancis secara rutin berlabuh di pelabuhan Singapura untuk memuat dan membongkar barang, mengisi bahan bakar, dan memasok kembali. Pentingnya pelabuhan sebagai pusat transshipment menjadikannya penghubung penting dalam jaringan perdagangan kolonial yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa (Turnbull, 2009).

Meskipun tidak ada hubungan bilateral formal, interaksi ekonomi dan maritim antara Singapura dan wilayah Prancis cukup signifikan. Sebagai pusat perdagangan utama di Kekaisaran Inggris, Singapura menarik para pedagang, saudagar, dan lalu lintas laut dari seluruh dunia, termasuk Indochina Prancis. Kapal-kapal dagang Prancis secara rutin berlabuh di Pelabuhan Singapura untuk memasok kembali, memperdagangkan, dan mengangkut barang-barang yang ditujukan ke Eropa dan tujuan Asia lainnya (Turnbull, 2009).

Interaksi maritim ini menciptakan jaringan saling ketergantungan. Signifikansi ekonomi Singapura sebagai entrepôt berarti bahwa negara ini memfasilitasi pergerakan produk Prancis seperti karet, beras, dan timah—komoditas yang juga diproduksi di Indochina. Bisnis Prancis, meskipun tidak setenar perusahaan Inggris atau Cina, hadir dalam ekosistem komersial Singapura. Selain itu, perusahaan yang berbasis di Singapura berdagang dengan koloni Prancis, yang selanjutnya menyatukan ekonomi regional (Wright, 1991).

Kehadiran perusahaan pelayaran Prancis di Singapura menggambarkan hubungan ekonomi antara keduanya. Perusahaan seperti Messageries Maritimes

memasukkan Singapura dalam rencana perjalanan mereka di Asia Timur, yang tidak hanya memfasilitasi pergerakan kargo tetapi juga perjalanan para administrator kolonial, misionaris, dan cendekiawan. Kamar Dagang Singapura terkadang terlibat dengan kepentingan komersial Prancis, yang sering kali berfokus pada asuransi maritim, tarif pelabuhan, dan peraturan perdagangan. Meskipun pertukaran ini bersifat transaksional, pertukaran ini memberikan kesinambungan dan menetapkan norma untuk keterlibatan ekonomi.

Selain itu, peran Singapura sebagai pusat komunikasi meningkatkan kepentingannya dalam jaringan regional. Perusahaan telegraf Prancis berupaya menghubungkan Indochina dengan jaringan kabel Inggris melalui Singapura, yang berujung pada kerja sama teknologi dan standarisasi antara kekuatan kolonial. Keterkaitan infrastruktur awal ini kemudian mendukung kolaborasi diplomatik dan teknologi yang lebih formal pada periode pascakolonial.

Perusahaan pelayaran Prancis seperti *Messageries Maritimes* memiliki rute layanan rutin yang menjadikan Singapura sebagai persinggahan utama. Interaksi maritim ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran ekonomi tetapi juga pergerakan pejabat kolonial, misionaris, dan pemukim. Populasi Singapura yang multibahasa dan administrasi yang ramah bisnis menjadikannya tempat yang menarik untuk perdagangan dan dialog lintas budaya.

Galangan kapal dan fasilitas dermaga Singapura terkadang melayani kapal-kapal Prancis, baik untuk perawatan maupun dukungan darurat. Sifat kosmopolitan pelabuhan tersebut berarti bahwa bahkan tanpa hubungan diplomatik formal, terdapat tingkat kerja sama operasional antara otoritas maritim Prancis dan Inggris.

Interaksi ini, meskipun sebagian besar bersifat teknis dan komersial, menciptakan jaringan informal yang nantinya akan mendukung keterlibatan bilateral yang lebih formal.

Pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, saat Singapura bergerak menuju pemerintahan sendiri, lingkungan geopolitik Asia Tenggara semakin dibentuk oleh Perang Dingin. Kekalahan Prancis dalam Perang Indochina Pertama dan Perjanjian Jenewa berikutnya pada tahun 1954 menandai titik balik yang besar. Sementara Prancis mulai menarik diri dari wilayah jajahannya di Asia, kekosongan strategis dengan cepat diisi oleh pemain geopolitik baru, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Asia yang baru merdeka.

Singapura, yang masih di bawah kendali Inggris tetapi bergerak menuju otonomi, menjadi semakin relevan dalam periode transisi ini. Lembaga diplomatik dan budaya Prancis, termasuk *Alliance Française*, mulai memainkan peran yang lebih aktif di Singapura, yang mencerminkan pergeseran dari keterlibatan kekuatan keras ke kekuatan lunak. Meskipun tidak sepenuhnya geopolitik, inisiatif budaya ini merupakan bagian dari strategi Prancis yang lebih luas untuk mempertahankan pengaruh di wilayah bekas jajahan melalui bahasa, pendidikan, dan diplomasi budaya.

Pada saat yang sama, pejabat Inggris dan Prancis di kawasan tersebut mulai bekerja sama secara lebih formal melalui organisasi multilateral dan saluran diplomatik informal. Kekhawatiran bersama atas komunisme, ketidakstabilan regional, dan munculnya gerakan nonblok mendorong dialog yang lebih besar

antara negara-negara bekas kolonial, sering kali dengan Singapura sebagai titik pertemuan karena infrastruktur dan lokasinya yang strategis.

Kehadiran agama Prancis di Singapura terutama berakar pada karya misionaris Katolik yang dipimpin oleh Missions Étrangères de Paris (MEP). Didirikan pada abad ke-17, MEP berperan penting dalam menyebarkan agama Katolik ke seluruh Asia. Pada abad ke-19, ketika kekuatan kolonial mulai menguasai wilayah pengaruh di Asia Tenggara, para misionaris MEP memperluas upaya mereka ke wilayah yang dikuasai Inggris seperti Singapura. Misi mereka tidak hanya bersifat religius tetapi juga peradaban—berusaha memperkenalkan pendidikan, perawatan medis, dan nilai-nilai budaya Barat bersama dengan doktrin Kristen (Song, 2011).

MEP mendirikan gereja, panti asuhan, dan sekolah yang utamanya melayani komunitas Katolik Tionghoa dan India. Salah satu lembaga yang terkenal adalah Gereja Santo Petrus dan Paulus, yang menjadi pusat utama bagi komunitas Katolik Tionghoa di Singapura. Para misionaris melaksanakan kebaktian dalam dialek lokal dan memadukan praktik budaya adat ke dalam kehidupan beragama, sebuah strategi yang meningkatkan tingkat konversi dan membantu mempertahankan komunitas agama dalam jangka panjang (Chew & Lee, 1991).

Selain itu, MEP memainkan peran penting dalam mendirikan layanan sosial. Para misionaris menyediakan layanan kesehatan, mengoperasikan klinik, dan menawarkan bantuan kepada kaum miskin. Layanan-layanan ini khususnya berdampak pada saat infrastruktur kesejahteraan publik di koloni tersebut belum berkembang. Sifat amal dari inisiatif-inisiatif ini mendapatkan rasa hormat dan

kesetiaan dari banyak penduduk setempat, bahkan mereka yang tidak pindah agama menjadi Katolik. Seiring berjalannya waktu, hal ini menciptakan infrastruktur lunak pengaruh agama Franco yang tertanam dalam penduduk setempat.

Di samping penjangkauan agama, para misionaris Prancis memberi penekanan besar pada pendidikan sebagai alat transformasi dan transmisi budaya. Lembaga-lembaga seperti Saint Joseph's Institution, meskipun akhirnya dijalankan oleh La Salle Brothers, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pendidikan Katolik awal yang berakar pada tradisi MEP. Sekolah-sekolah ini menawarkan kurikulum yang tidak hanya mencakup pengajaran agama tetapi juga sains, humaniora, dan bahasa-bahasa Eropa (Chew & Lee, 1991).

Dengan mempromosikan pendidikan gaya Barat di antara penduduk setempat, para misionaris Prancis membantu membina generasi baru intelektual dan profesional Asia yang akrab dengan ideologi dan norma sosial Eropa. Banyak dari siswa ini kemudian menjadi berpengaruh di sektor layanan sipil, bisnis, dan akademis Singapura. Warisan pendidikan lembaga-lembaga ini dengan demikian berlipat ganda: mereka berkontribusi pada profesionalisasi penduduk setempat dan juga membangun persepsi positif terhadap standar dan nilai-nilai pendidikan Prancis.

Pengaruh pendidikan Prancis meluas hingga ke luar sekolah misionaris. Buku, pamflet, dan risalah keagamaan yang dicetak dalam bahasa Prancis, Melayu, Tamil, dan Mandarin didistribusikan ke seluruh koloni. Sastra, filsafat, dan pemikiran ilmiah Prancis secara bertahap memasuki wacana elit melalui saluran

intelektual informal, yang menjadi dasar bagi pertukaran dan kolaborasi akademis di kemudian hari.

Pembentukan Alliance Française de Singapour pada tahun 1949 menandai pergeseran dari keterlibatan budaya yang murni keagamaan menjadi sekuler. Lembaga ini, yang didedikasikan untuk mempromosikan bahasa dan budaya Prancis, mewakili komitmen Prancis yang semakin besar terhadap diplomasi budaya selama periode dekolonisasi. Alliance Française menyelenggarakan kursus bahasa, pameran seni, konser, pemutaran film, dan rangkaian ceramah yang menarik partisipasi dari para ekspatriat dan penduduk setempat yang berpendidikan (Alliance Française de Singapour, 2021).

Peran Aliansi sangat penting dalam memperkenalkan dan mempertahankan keberadaan budaya Prancis di Singapura pada saat koloni tersebut mengalami transisi politik. Melalui program non-politik, Aliansi mampu melibatkan masyarakat Singapura dengan cara yang dianggap netral dan memperkaya. Yang terpenting, Aliansi menargetkan kaum elit yang sedang berkembang—mahasiswa, profesional, dan pegawai negeri—yang kemudian akan mengambil peran kepemimpinan di Singapura yang merdeka.

Acara budaya yang diselenggarakan oleh Aliansi sering kali menampilkan seniman, musisi, dan intelektual Prancis terkemuka. Acara-acara ini mendorong terciptanya lingkungan apresiasi dan dialog lintas budaya, yang memungkinkan warga Singapura memandang Prancis tidak hanya sebagai kekuatan Eropa yang jauh, tetapi juga sebagai mitra budaya yang dinamis.

Tokoh agama dan budaya Prancis di Singapura tidak beroperasi secara terpisah. Mereka terlibat dengan komunitas Tionghoa, Melayu, India, dan Eurasia yang ada dengan cara yang memfasilitasi pertukaran budaya dan adaptasi bersama. Misalnya, liturgi Katolik diadaptasi untuk menyertakan dialek Tionghoa, dan perayaan gereja sering kali disesuaikan dengan adat dan kalender setempat. Misionaris Prancis mempelajari bahasa setempat, yang tidak hanya meningkatkan komunikasi tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi adat setempat.

Proses adaptasi budaya ini mengarah pada bentuk sinkretisme di mana praktik Katolik mengambil cita rasa lokal. Kemampuan beradaptasi ini adalah salah satu alasan misi Prancis mencapai keberhasilan relatif dibandingkan dengan upaya kolonial yang lebih kaku. Hal ini juga mencerminkan strategi misionaris Prancis yang lebih luas yang digunakan di Indochina, di mana akulturasi dan pendalaman bahasa dipandang penting untuk konversi dan integrasi sosial (Thompson, 2006).

Di bidang budaya, Alliance Française menyelenggarakan pameran seni yang menampilkan seniman Prancis dan lokal, menciptakan ruang dialogis untuk saling menghargai. Platform ini memungkinkan seniman Singapura untuk mengakses norma-norma seni Eropa sambil memamerkan tema-tema lokal, sehingga mendorong bentuk identitas seni lintas budaya yang bergema dalam kebangkitan seni pascakolonial Singapura di kemudian hari.

Kehadiran budaya dan agama Prancis di Singapura kolonial dapat dianalisis melalui sudut pandang soft power dan imperialisme budaya. Konsep soft power milik Joseph Nye—yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui daya tarik alih-alih paksaan—berlaku di sini. Tidak seperti

pemaksaan militer atau ekonomi, pengaruh Prancis beroperasi melalui pendidikan, agama, dan budaya, sehingga tertanam dalam struktur sosial koloni (Nye, 2004).

Selain itu, gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni budaya membantu menjelaskan bagaimana para misionaris dan lembaga Prancis secara halus membentuk pandangan dunia di antara para subjek kolonial Singapura. Dengan mempromosikan cita-cita Barat tentang kemajuan, akal sehat, dan moralitas melalui saluran keagamaan dan pendidikan, mereka berpartisipasi dalam proyek imperialisme budaya Eropa yang lebih luas (Gramsci, 1971). Namun, pendekatan Prancis relatif pluralistik dan dialogis dibandingkan dengan model asimilasi kolonial Inggris, terutama karena menekankan rasa hormat budaya dan integrasi bahasa.

Warisan budaya dan agama Prancis di Singapura terlihat jelas dalam beberapa lembaga dan praktik yang bertahan lama. Gereja dan sekolah yang didirikan oleh misionaris Prancis terus beroperasi hingga saat ini, sering kali sebagai pusat pendidikan dan agama yang bergengsi. Alliance Française tetap menjadi lembaga budaya terkemuka, dan banyak warga Singapura terus mempelajari bahasa dan budaya Prancis.

Secara lebih luas, interaksi awal antara Prancis dan Singapura mendorong terciptanya iklim rasa ingin tahu dan rasa hormat bersama yang membuka jalan bagi hubungan diplomatik formal setelah kemerdekaan. Keakraban budaya yang terjalin selama masa kolonial memungkinkan negosiasi yang lebih lancar dan hubungan yang lebih kuat di berbagai bidang seperti pendidikan, seni, dan sains. Saat ini, Singapura dan Prancis menjalin kemitraan yang dinamis yang ditandai dengan

seringnya pertukaran budaya, kolaborasi akademis, dan dukungan diplomatik bersama

Runtuhnya kekaisaran kolonial Prancis setelah Perang Dunia II dan kemunculan gerakan kemerdekaan di berbagai bagian Asia membawa pengaruh besar bagi struktur regional. Keluarnya Prancis secara perlahan dari Indochina sejalan dengan kemunculan Singapura sebagai entitas yang mandiri, dan akhirnya bertransformasi menjadi negara berdaulat pada tahun 1965. Perubahan ini menandai awal baru dalam interaksi antara Singapura dan Prancis, yang lebih berfokus pada diplomasi antarnegara ketimbang faktor colonial (Cai, 2013).

2.1.2 Pasca Kemerdekaan Singapura

Setelah Singapura merdeka, Prancis segera mengakui negara baru itu dan menjalin hubungan diplomatik resmi pada tahun 1965. Pengakuan awal ini berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama antara kedua negara. Prancis membuka kedutaan besar di Singapura tak lama setelah kemerdekaan, dan Singapura membalasnya dengan mendirikan kedutaan besar di Paris (Cai, 2013).

2.2. Bentuk-bentuk Hubungan Kerjasama

2.2.1 Ekonomi dan Strategis

Pada akhir abad ke-20, Perancis dan Singapura telah membangun kemitraan ekonomi yang kokoh. Perusahaan-perusahaan besar dari Prancis seperti Airbus, Safran, dan L'Oréal memiliki keberadaan utama di Singapura, yang berperan sebagai pusat regional untuk kawasan Asia Tenggara. Sebagai balasannya,

perusahaan-perusahaan dari Singapura telah melakukan ekspansi ke pasar Prancis, khususnya dalam sektor keuangan, teknologi, dan logistik (Business France, 2020).

Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Singapura (EUSFTA) yang ditandatangani pada tahun 2019, didukung oleh Prancis, menjadi momen penting dalam hubungan ekonomi antara Singapura dan Prancis. Perjanjian ini menghilangkan berbagai rintangan perdagangan, memperluas akses ke pasar, serta mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan (European Commission, 2019).

Hubungan pertahanan antara kedua negara juga patut diperhatikan. Sejak tahun 1990-an, Angkatan Bersenjata Singapura telah menyelenggarakan pelatihan di Prancis. Latihan bersama dan pengadaan pertahanan menggarisbawahi tingkat kepercayaan strategis yang tinggi (Ministry of Defence Singapore, 1998).

2.2.2 Kerjasama Ilmiah dan Global

Pada era abad ke-21, Singapura dan Prancis telah meningkatkan kolaborasi dalam bidang riset dan inovasi. Proyek yang melibatkan institusi riset Prancis seperti CNRS dan rekan-rekan dari Singapura seperti A*STAR telah menghasilkan perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, serta solusi terkait iklim (A*STAR Singapura, 2023).

Kedua negara juga berperan sebagai mitra yang aktif dalam pengelolaan global. Dari kebijakan iklim yang berdasar pada Perjanjian Paris hingga standar perdagangan digital di Organisasi Perdagangan Dunia, Singapura dan Prancis mendukung sistem internasional yang berlandaskan aturan dan kerja sama multilateral.

2.3. Dibentuknya Hubungan Bilateral Melalui Diplomasi Museum

2.3.1. Sejarah

Hubungan antara budaya Prancis dan Singapura dimulai setelah PD II, saat Singapura, yang merupakan koloni Inggris pada waktu itu, mulai terbuka terhadap pengaruh internasional. Prancis mulai hadir dengan mengirimkan misi budaya dan mendirikan *Alliance Française de Singapour* pada tahun 1949. Ketika Singapura tumbuh menjadi daerah yang kosmopolitan, wilayah ini menjadi tempat yang ideal untuk interaksi antar budaya. Kerja sama ini semakin kuat di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ketika kedua negara menyadari manfaat dari soft power untuk meningkatkan pemahaman bersama. (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022).

Singapura memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1959, yang membuka jalan bagi kemerdekaan. Ketika koloni tersebut beralih ke otonomi, Prancis mulai menunjukkan minat diplomatik yang lebih nyata. Meskipun hubungan diplomatik penuh baru terjalin setelah kemerdekaan, kontak informal dan pertukaran budaya meningkat pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an.

Peran *Alliance Française* menjadi lebih menonjol selama periode ini. Dengan menyelenggarakan festival film, pameran seni, dan kelas bahasa Prancis, lembaga ini menumbuhkan pandangan positif terhadap budaya Prancis di kalangan warga Singapura. Strategi soft power ini turut membentuk persepsi Singapura terhadap Prancis sebagai mitra dalam pengembangan budaya dan pendidikan.

Di bidang pendidikan tinggi, mahasiswa Singapura mulai menjajaki peluang untuk belajar di Prancis. Meskipun jumlahnya terbatas, pertukaran pendidikan awal menjadi panggung bagi kerja sama bilateral di masa mendatang

dalam bidang akademik dan ilmiah. Penekanan Prancis pada budaya, pendidikan, dan seni selaras dengan identitas nasional Singapura yang sedang berkembang dan aspirasinya untuk menjadi kota global.

Khususnya, para intelektual dan diplomat Prancis terkadang memberikan ceramah di lembaga-lembaga akademis Singapura. Pertukaran ini tidak hanya bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa percaya dan keakraban antara kedua masyarakat. Perspektif Prancis tentang pembangunan pasca-kolonial, perencanaan kota, dan hukum internasional memengaruhi dialog kebijakan di Singapura, khususnya di kalangan pemimpin muda yang kemudian membentuk kerangka diplomatik negara tersebut.

Pada tahun 2009, negara Singapura dan Prancis menyetujui sebuah perjanjian budaya yang akan mengubah cara pandang serta kedalaman hubungan mereka. MOU yang ditandatangani antara Kementerian Informasi, Komunikasi, dan Seni (MICA) dari Singapura dan Kementerian Luar Negeri dan Urusan Eropa (MFA) Prancis akan memperkuat kolaborasi dalam bidang seni, warisan budaya, dan pertukaran budaya antara kedua negara (Cai, 2013).

